PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DENDI GUSTINANDAR**
2. Jabatan : **DIREKTUR BADAN USAHA PELABUHAN**
3. NHK : **629437**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , WARISAN Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 290.500.000**

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 75.000.000**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**738.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.953.500.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**620.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.333.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.